



LAPORAN KINERJA

Balai Riset Budidaya Ikan Hias

**Triwulan I
Tahun
2026**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Gleni Hasan Huwoyon

Plt. Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)

Ketua Tim Penyusun

Gleni Hasan Huwoyon

Kepala Sub Bagian Umum

Anggota Tim Penyusun

Adinda Rizkylia Shahrani

Sub Koordinator Kelompok Tata Operasional

Armin Hidayat

Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha

Endah Susiyanti

Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Teknis

Sekretariat

Sheila Savitri

Staf Kelompok Tata Operasional

Galuh Laksita Swasti

Staf Kelompok Tata Operasional

Susiyanti

Staf Kelompok Tata Operasional

Iswahyudi

Staf Kelompok Tata Operasional

Ipan Dahniar

Staf Kelompok Tata Operasional

Kontributor

Ifana Agustina

Staf Kelompok Tata Usaha (Kepegawaian)

Dewinta Hesti Widyastantri

Staf Kelompok Tata Usaha (Keuangan)

Fitri Rahmawati

Staf Kelompok Pelayanan Teknis

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat ijin dan rahmat-Nya penyusunan buku **"Laporan Kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Triwulan I Tahun Anggaran 2026"** dapat diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas BRBIH dalam melaksanakan Program Perikanan budidaya ikan hias untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya erat kaitannya terselenggaranya *good governance* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BRBIH Triwulan I Tahun 2026 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja TA 2026. Laporan ini sangat penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja organisasi pada Triwulan I Tahun 2026. Capaian Kinerja ini dapat tercapai berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran pegawai BRBIH baik instuktur, fungsional lain dan personil manajerial. Diharapkan pada tahun 2026 kegiatan-kegiatan yang diamanatkan pada BRBIH dapat terlaksana secara optimal sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja BRBIH Triwulan I Tahun 2026 ini, atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Kami membuka sekiranya jika ada saran dan masukan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.



Depok, 21 April 2026

Dit. Kepala BRBIH

Gleni Hasan Huwoyon

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragaan SDM.....	4
E. Sistematika Laporan Kinerja	4
F. Potensi dan Permasalahan.....	6
II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Rencana Kerja Tahun 2026.....	13
C. Perjanjian Kinerja	14
D. Pengukuran Kinerja	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	39
IV. PENUTUP	47
A. Capaian Kinerja.....	47
C. Permasalahan dan Rekomendasi.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BRBIH Triwulan I Tahun 2026	vii
Tabel 2. Fasilitas Balai Riset Budidaya Ikan Hias	8
Tabel 3. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target 2025–2029	12
Tabel 4. Program BRBIH Tahun 2026	13
Tabel 5. Rincian Revisi DIPA	13
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2026	15
Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2026	20
Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator 1	21
Tabel 9. Bobot Nilai IKPA 2026	24
Tabel 10. Kategori Nilai IKPA	25
Tabel 11. Bobot Variabel Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	28
Tabel 12. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	28
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja 7	34
Tabel 14. Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2026	40
Tabel 15. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan Tahun 2026	41
Tabel 16. Rincian Revisi DIPA BRBIH Tahun 2026	43
Tabel 17. Capaian Kinerja BRBIH Tahun 2026	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard Kinerja Level 3 BRBIH	vi
Gambar 2. Struktur Organisasi BRBIH	4
Gambar 3 . Komposisi Pegawai BRBIH Tahun 2026 (PNS 25, PJLP 17)	4
Gambar 4. Status Indeks capaian IKK	16
Gambar 5. <i>Dashboard</i> Kinerja BRBIH Tahun 2026	19
Gambar 6. Indikator Pelaksanaan Anggaran BRBIH Tiwulan I Tahun 2026	25
Gambar 7. Reformulasi Dimensi Kompetensi Tahun 2026	30
Gambar 8. Reformulasi Dimensi Kualifikasi Tahun 2025	30
Gambar 9. Kategori Dimensi Kinerja Tahun 2025	30
Gambar 10. Kategori Nilai IP ASN	31
Gambar 11. Dashboard Kinerja BRBIH level 3 BRBIH	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan visi dan misi Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH), pada bulan Januari 2026 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BRBIH dengan Plt. Sekretaris BPPSDMKP sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dalam perjanjian kinerja tersebut ditetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja BRBIH Tahun 2026.

Pengukuran capaian kinerja BRBIH Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) pada perspektif yang telah ditetapkan. Proses pencatatan dan pengukuran kinerja dilaksanakan melalui aplikasi Kinerjaku KKP (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, BRBIH mencatat Nilai Kinerja Organisasi sebesar 110%, yang menunjukkan capaian kinerja sangat baik. Secara keseluruhan, dari 2 indikator kinerja yang diukur dari 9 IK yang diperjanjikan, terdapat 1 indikator dengan notifikasi hijau dan 1 indikator dengan notifikasi biru, yang menggambarkan ketercapaian target kinerja secara optimal sebagaimana dashboard kinerja berikut:



Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Level 3 BRBIH

Pada triwulan I 2026 ini kinerja BRBIH diukur pada 2 IKM. Capaian tersebut mencakup aspek tindak lanjut rekomendasi Itjen yang dimanfaatkan dan RUP yang diumumkan, sebagaimana data berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BRBIH Triwulan I Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN I 2026	CAPAIAN TRIWULAN I 2026	%
Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2026						110
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86	86	86	100
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1			
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5			
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,75			
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82,1			
		6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71			
		7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77	77	100	120
		8 Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1			
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90			

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRBIH pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp. 1.949.239.788,- atau 21,97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.870.947.000,-. Jika pagu RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp. 402.760.000,- tidak diperhitungkan maka persentasenya menjadi 23,02% dari pagu Rp. 8.468.187.000,- berdasarkan data aplikasi SAKTI Kemenkeu per 31 Maret 2026. Tingkat penyerapan anggaran tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BRBIH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pengelolaan kinerja BRBIH di masa mendatang. BRBIH berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.



Bab 1

Pendahuluan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- b) Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g) Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Balai Riset Budidaya Ikan Hias sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BRBIH dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Laporan Kinerja BRBIH Tahun 2026 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BRBIH serta

sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BRBIH guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi BRBIH, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

B. Tujuan

Laporan Kinerja BRBIH merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRBIH untuk meningkatkan kinerja.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, BRBIH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM).

BRBIH mempunyai tugas melaksanakan riset budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut berdasarkan lingkungan fisik, dengan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya ikan hias;
2. Pelaksanaan riset perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut meliputi perbenihan dan sistem, reproduksi, domestikasi dan pemuliaan sumber daya plasma nutfah Ikan hias, nutrisi dan teknologi pakan, sistem ikan, lingkungan, serta teknologi budidaya ikan hias;

3. Pengembangan teknologi perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut;
4. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
5. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut BRBIH di dukung oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagaimana berikut:

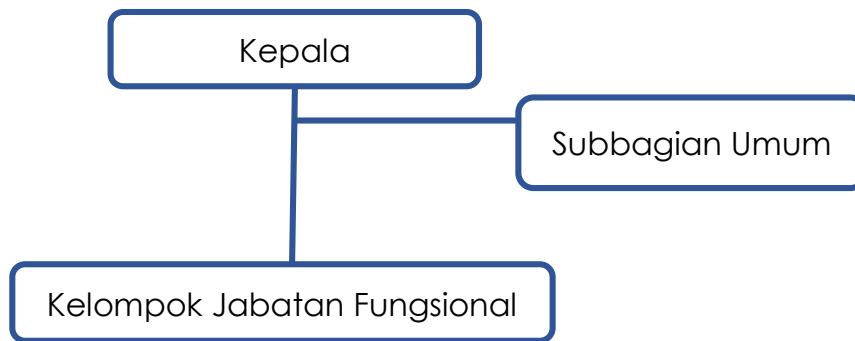
a. Subbagian Umum

Subbagian umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepala BRBIH dengan tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Budidaya Ikan Hias sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Budidaya Ikan Hias.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

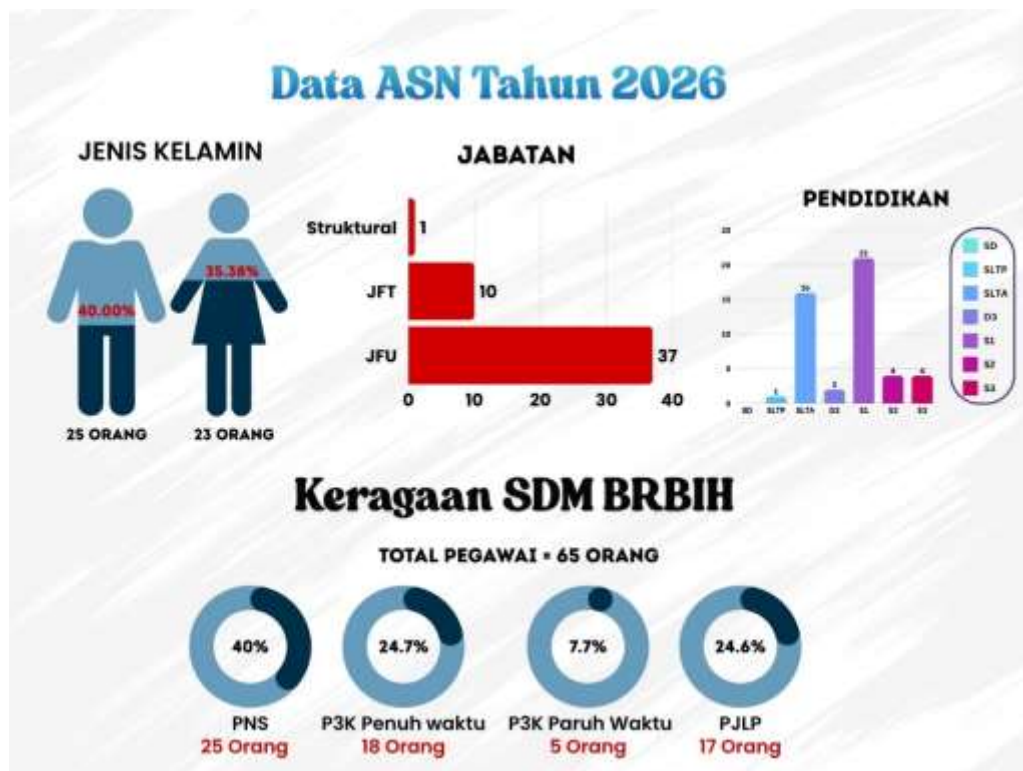
Struktur organisasi BRBIH sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 77/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi BRBIH

D. Keragaan SDM

SDM BRBIH pada akhir Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 65 orang yang terdiri dari 48 orang dengan status ASN dan 17 orang dengan status PJLP. Adapun komposisi SDM BRBIH, sebagai berikut:



Sumber : Portal KKP

Gambar 3 . Komposisi Pegawai BRBIH Tahun 2026

E. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

a. Cover Laporan

b. Kata Pengantar

Pada bagian ini berisi tentang pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan, dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BRBIH

c. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025.

d. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

e. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

f. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

g. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

h. Lampiran

Bab ini berisi perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu

F. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

1. Sumber Daya Manusia

Balai Riset Budidaya Ikan Hias memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mendukung pengembangan sektor perikanan, khususnya budidaya ikan hias. SDM di balai ini terdiri dari instruktur, teknisi akuakultur, teknisi lapangan dan tenaga administrasi yang kompeten di bidangnya.

Para instruktur, teknisi akuakultur dan teknisi lapangan di balai riset ini memiliki pengalaman luas dalam teknik budidaya ikan hias, baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi modern. Mereka juga berkompeten dalam manajemen pakan, kualitas air, dan pengendalian penyakit, yang menjadi kunci keberhasilan dalam budidaya ikan hias.

Dengan adanya SDM yang handal, BRBIH turut aktif dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini mendorong terciptanya inovasi dalam peningkatan efisiensi dan keberlanjutan dalam budidaya ikan hias.

Tidak hanya itu, BRBIH juga terus mendukung pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku industri untuk meningkatkan keterampilan dalam budidaya ikan hias melalui program pelatihan dan workshop. Dengan keahlian yang dimiliki, SDM di Balai Riset Budidaya Ikan Hias memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan industri ikan hias Indonesia, menciptakan peluang pasar baru, serta mendukung konservasi spesies ikan hias yang langka dan bernilai ekonomi tinggi.

2. Sumber Daya Ikan

Potensi ikan hias Indonesia tidak hanya bersumber dari air tawar, ikan hias laut juga cukup prospektif untuk dikembangkan, selain dari itu kita sadari bahwa potensi ikan hias akan mengalami eksploitasi yang berlebihan apabila dimanfaatkan secara tidak efisien, tidak dikelola secara arif dan bijaksana dan akhirnya kekurangan persediaan atau bahkan kehilangan spesies. Sebagai pasar ikan hias terbesar di dunia, adanya regulasi pasar ikan hias di Eropa yang mensyaratkan ekspor beberapa komoditas ikan hias harus dari hasil budidaya dapat menjadi peluang dan tantangan yang sangat dibutuhkan guna menembus pasar tersebut.

Melihat hal tersebut maka BRBIH sebagai satker di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bergerak dalam pengembangan budidaya ikan hias tentu saja berpotensi sangat besar untuk mendukung peningkatan produksi nasional. Saat ini, sumberdaya ikan yang masih dibudidayakan di BRBIH terdiri atas ikan hias air tawar dan masih dibudidayakan, diantaranya Ikan Arwana, Koi, Discus dan Platy disamping budidaya komoditas maggot sebagai pakan alternatif. Ikan hias dari hasil samping kegiatan riset beberapa tahun sebelumnya masih terpelihara sebagai ikan koleksi yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi pengunjung yang datang ke BRBIH.

3. Sarana dan Prasarana

Selain potensi berupa SDM dan Sumber Daya Ikan, BRBIH juga memiliki potensi sarana dan prasarana berupa lahan yang dimiliki seluas 12,5 Ha dengan fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan kelautan dan perikanan. Sejak beralihnya fungsi riset di tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian fungsi sarana dan prasarana yang ada dan dikelompokkan ke dalam beberapa cluster, diantaranya cluster loca feed, cluster tanaman hias air dan cluster

arwana. Penggunaan lahan untuk fasilitas lainnya masih terus dikembangkan dan dituangkan dalam site plan BRBIH yang disiapkan sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru nantinya. Fasilitas-fasilitas yang tersedia saat ini disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Fasilitas Balai Riset Budidaya Ikan Hias

NO	FASILITAS	FUNGSI	KEGIATAN
1	Laboratorium Uji	Lab. Genetika	analisa molekuler seperti RAPD, PCR, MHC, Uji KHV
		Lab. Nutrisi	-
		Lab. Kualitas Air	analisa kualitas air dengan berbagai parameter fisika dan kimia seperti Amonia, Nitrit, Nitrat, Suhu, Oksigen Terlarut, pH, Alkalinitas, Kesadahan, TSS, Konduktivitas,
		Lab. Biologi	Budidaya tanaman hias air
		Lab. Pakan Alami	Budidaya pakan alami berupa moina dengan hasil samping cacing beku
2	Hatcheri/ hanggar	Aquatia 1	Budidaya ikan hias platy
		Aquatia 2	Budidaya ikan hias Koi dan Koki
		Aquatia 3	Gedung serba guna
		Aquatia 4	Budidaya discuss dan pemeliharaan ikan koleksi
		Klaster Arwana	Budidaya ikan hias arwana
		Klaster Loca Feed	Budidaya magot dan produksi pakan buatan dengan produk turunan magot
3	Kolam/Bak Pemeliharaan	Kolam Beton	Pemeliharaan Ikan Koi
		Kolam Tanah	Budidaya ikan koi
		Bak Beton	Budidaya ikan platy, pembesaran ikan koki
4	Gedung Penunjang	Gedung Administrasi	Pusat keadministrasian BRBIH
		Gedung Instruktur	Ruang kerja instruktur dan teknisi serta mahasiswa PKL/Magang
		Guest house	Sarana pendukung untuk tamu dan peserta magang, pkL dan penelitian
		Showroom	Sarana untuk menampilkan berbagai jenis ikan hias sebagai sumber edukasi bagi masyarakat
		Musholla	Sarana ibadah umat muslim di lingkungan BRBIH
		Stokist Room	Sarana penyimpanan barang persediaan dan barang operasional perkantoran

Sumber: Data BMN BRBIH 2026

b. Permasalahan

Saat ini masalah dan tantangan yang sedang dihadapi BRBIH dalam pelaksanaan program untuk mendukung pembangunan KP diantaranya

adalah beralihnya fungsi riset ke BRIN menyebabkan tugas dan fungsi BRBIH sebagai Balai Riset menjadi tidak relevan lagi untuk saat ini. Belum terbitnya peraturan perundangan perihal Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) akibat peralihan riset mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.



Bab 2

Perencanaan Kinerja

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai satuan kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), BRBIH berperan dalam mendukung Rencana Strategis BPPSDMKP. Visi BPPSDMKP sebagaimana tercantum dalam Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 adalah *“Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.”*

Visi BPPSDMKP ini sejalan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029 yaitu *“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”*.

Sejalan dengan visi nasional *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”* dan visi KKP, visi BPPSDMKP menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan.

Dalam Renstra BPPSDMKP dijelaskan bahwa mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, untuk mendukung Misi KKP, BPPSDMKP melaksanakan 1 dari 4 Misi/Asta Cita yang difokuskan KKP dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi KKP *“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”* tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu *“Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”*.

Sebagaimana tercantum juga dalam Renstra BPPSDMKP 2025-2029, Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 "Meningkatnya Kualitas SDM KP" dan SS-5 "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas". Untuk mendukung SS-4 dan SS-5 tersebut, BPPSDMKP menjabarkan ke dalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target 2025–2029

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (ISP)	Target 2026	Target 2029
SS-4: Meningkatkan Kualitas SDM KP	SP-1: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP	Persentase lulusan pendidikan/pelatihan KP yang kompeten/ tersertifikasi dan terserap di DUDIKA	76%	79%
		Persentase peningkatan omzet kelompok pelaku utama yang ditingkatkan kelasnya	52%	58%
SS-5: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas	SP-2: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPSDM	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDM (Indeks)	86,5	88

Sumber: Renstra BPPSDM KP 2025-2029

Berdasarkan Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029, maka pada tahun 2026, BRBIH mendukung SS-5 KKP dengan Sasaran Program SP-2 BPPSDMKP. Dalam mendukung SP-2 tersebut, BRBIH melaksanakan Program yang mengacu kepada Rencana Kerja KKP Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 tanggal 18 Desember 2025.

B. Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan mengacu kepada Rencana Kerja KKP dan BPPSDMKP, maka Program yang dilaksanakan di BRBIH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Program BRBIH Tahun 2026

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (RP)
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.870.947.000
Jumlah Anggaran		8.870.947.000

Sumber: DIPA BRBIH Tahun 2026

Seiring berjalannya kegiatan terdapat beberapa perubahan DIPA dengan beberapa penyesuaian dalam dukungan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Revisi DIPA

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
Awal	Tanggal	1 Desember 2026	-
	Belanja Pegawai	5.571.957.000	-
	Belanja barang	3.298.990.000	-
	Total	8.870.947.000	
1	Tanggal	1 Desember 2025	31 Desember 2025
	Belanja Pegawai	5.571.957.000	5.567.169.000
	Belanja barang	3.298.990.000	3.303.778.000
	Total Anggaran	8.870.947.000	8.870.947.000
	Program	1 Program	2 Program
	Keterangan	Revisi Anggaran RO Khusus berdasarkan: Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1158/AG/AG.3/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran ROK Khusus Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan TA 2026	
2	Tanggal	31 Desember 2025	12 Februari 2026
	Belanja Pegawai	5.567.169.000	5.567.169.000
	Belanja barang	3.303.778.000	3.303.778.000
	Total Anggaran	8.870.947.000	8.870.947.000
	Program	1 Program	2 Program
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA	

Sumber: Aplikasi Myintress Kemenkeu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2025 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 8.870.947.000, yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp 5.571.957.000 dan Belanja Barang sebesar Rp3.298.990.000.

Sepanjang periode pelaksanaan anggaran, telah dilakukan dua kali revisi DIPA sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Pada Revisi ke-1 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2025, terjadi penyesuaian komposisi belanja, dimana Belanja Pegawai mengalami penurunan menjadi Rp 5.567.169.000 dan Belanja Barang meningkat menjadi Rp 3.303.778.000, namun total anggaran tetap sebesar Rp 8.870.947.000. Selain itu, terdapat perubahan struktur program dari semula satu program menjadi dua program. Revisi ini dilakukan sebagai tindaklanjut BPPSDMKP atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026.

Selanjutnya pada Revisi ke-2 tanggal 12 Februari 2026, tidak terdapat perubahan pada pagu anggaran maupun komposisi belanja. Revisi ini hanya berupa penyesuaian administratif pada Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tercantum pada Halaman III DIPA, guna memastikan kesesuaian antara rencana penyerapan anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, revisi DIPA pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi lebih bersifat penyesuaian komposisi belanja dan administrasi perencanaan kas, tanpa memengaruhi total pagu anggaran. Hal ini mencerminkan upaya pengelolaan anggaran yang adaptif terhadap kebijakan efisiensi serta tetap menjaga stabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

C. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran program dan kegiatan secara optimal dan tepat waktu, pada tahun 2026 disusun Perjanjian

Kinerja BRBIH dengan satu sasaran kegiatan (SK) yang harus dicapai sebelum akhir tahun. Untuk mengukur keberhasilan SK, ditetapkan ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan IK BRBIH pada tahun 2026 berjumlah 9 IK, dengan rincian pada PK sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,75
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82,1
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77
		8	Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90

Sumber: Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2026

Berdasarkan tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tersebut, BRBIH menetapkan target kinerja yang terukur dan komprehensif untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, yang mencakup aspek pengawasan, pengelolaan dan perencanaan anggaran, akuntabilitas kinerja, profesionalitas ASN, pengelolaan kearsipan, transparansi pengadaan, inovasi pelayanan publik, serta keterbukaan informasi. Penetapan indikator dan target tersebut diharapkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, efisien, dan berorientasi pada hasil guna mencapai kinerja organisasi secara optimal pada Tahun 2026.

D. Pengukuran Kinerja

Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRBIH Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, sehingga diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- Adapun status Indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 4. Status Indeks capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRBIH dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja di lingkup BRBIH yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor:

17/BRBIH/RC.610/I/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Sekretariat BPPSDMKP.



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan instrumen fundamental bagi Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini dilakukan guna memastikan bahwa visi dan misi organisasi selaras dengan realisasi di lapangan, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi dan penetapan kinerja tahun 2026.

Seluruh pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) BRBIH mengacu pada kerangka kerja logis (*Logical Framework Analysis*) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi melalui sistem aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Integrasi data ini menjamin bahwa setiap hasil pengukuran bersifat transparan dan objektif.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja triwulan I tahun 2026, BRBIH berhasil mencatatkan kinerja korporat yang sangat positif dengan rata-rata capaian sebesar 110%. Dari total indikator yang dikelola, sebaran status capaian pada *dashboard* Kinerjaku adalah sebagai berikut:

- 1 Indikator Kinerja berstatus Biru: Menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dan melampaui target yang ditetapkan secara signifikan.
- 1 Indikator Kinerja berstatus Hijau: Menunjukkan capaian yang berhasil memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Hasil ini mencerminkan komitmen seluruh jajaran BRBIH dalam menjaga kualitas performa organisasi tetap berada pada level optimal. Rincian sebaran status capaian tersebut disajikan pada tampilan *dashboard* kinerjaku berikut ini:



Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Gambar 5. Dashboard Kinerjaku BRBIH Tahun 2026

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) dilakukan secara sistematis melalui mekanisme pengukuran kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Instrumen ini digunakan sebagai parameter objektif untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, serta sebagai dasar pertanggungjawaban atas kontrak kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Pengukuran kinerja ini mengintegrasikan capaian riil di lapangan dengan target yang telah diidentifikasi dalam Peta Strategi BRBIH. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, secara kolektif BRBIH mencatatkan performa yang sangat impresif dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2026 sebesar 110 %. Capaian ini merupakan akumulasi dari 2 (dua) Indikator Kinerja (IK) yang seluruhnya berhasil memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN I 2026	CAPAIAN TRIWULAN I 2026	%
Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2026						110
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86	86	86	100
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1			
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5			
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,75			
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82,1			
		6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71			
		7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77	77	100	120
		8 Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1			
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90			

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Berdasarkan gambaran umum capaian yang tersaji dalam Tabel 8, bagian selanjutnya akan menguraikan analisis lebih mendalam pada masing-masing indikator kinerja secara spesifik. Analisis ini mencakup evaluasi teknis, faktor-faktor pendukung keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta keterkaitan antara efisiensi anggaran dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Berikut adalah pembahasan rincian capaian untuk masing-masing Indikator Kinerja (IK) BRBIH sepanjang tahun 2026:

Sasaran Kegiatan 1

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRBIH mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal. Pengukuran dilakukan secara triwulanan dengan menghitung perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah berstatus tuntas terhadap total rekomendasi yang diberikan yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 hingga Triwulan III Tahun 2026. Indikator ini bersifat maximize, dimana capaian yang semakin tinggi menunjukkan semakin baiknya komitmen unit dalam memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BPPSDM Nomor 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026, BRBIH mencatatkan realisasi kinerja sebesar 86% dari target yang ditetapkan sebagaimana data berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator 1

SK.01 – Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.01 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)									
Realisasi Triwulan I Tahun 2022-2025				Triwulan I Tahun 2026				Target Jangka Menengah	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
	75	100	85	86	86	100,00	1,18	89	96,63

Sumber : Data Primer BRBIH 2026

Berdasarkan Tabel 9, capaian kinerja pada IKSK.01.01 yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 75% meningkat signifikan menjadi

100% pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 85% dikarenakan tidak adanya rekomendasi Itjen yang harus ditindaklanjuti oleh BRBIH sehingga capaiannya sesuai dengan target. Pada tahun 2026, realisasi kembali mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 86% atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Selain itu, terdapat peningkatan sebesar 1,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 89%, capaian tahun 2026 telah mencapai 96,63% terhadap target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan dalam mendukung perbaikan kinerja telah berjalan dengan baik dan konsisten menuju pencapaian target jangka menengah.

Keberhasilan BRBIH dalam menjaga kualitas tata kelola sehingga tidak memunculkan rekomendasi atau temuan pengawasan baru didukung oleh efektivitas fungsi pencegahan di tingkat internal. Faktor pendukung utama dalam pencapaian ini adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan secara disiplin dan berkelanjutan melalui pelaporan rutin pada aplikasi Silastri serta Portal KKP.

Selain itu, komitmen pimpinan dalam melakukan pengawasan menjadi kunci krusial melalui pelaksanaan *briefing* rutin setiap pagi dan sore hari di masing-masing klaster, serta rutin melaksanakan rapat mingguan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kendala secara cepat dan tepat. Agenda ini berfungsi sebagai wadah deteksi dini untuk memitigasi risiko operasional dan teknis sebelum menjadi kendala yang lebih besar. Upaya pengawalan ini juga diperkuat dengan rapat koordinasi SPIP bulanan serta monitoring aktif pada aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Tindak Lanjut), guna memastikan seluruh administrasi dan operasional organisasi tetap berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku."

Program utama yang menjadi pilar keberhasilan capaian indikator ini adalah Layanan Perkantoran. Keberhasilan tersebut didukung oleh

pelaksanaan pengendalian internal yang intensif dan berkelanjutan, dengan keterlibatan langsung Kepala Satuan Kerja bersama para penanggung jawab kegiatan melalui evaluasi rutin mingguan. Untuk memastikan pengawasan menjangkau hingga level operasional, dilaksanakan briefing pagi dan sore setiap hari pada masing-masing klaster yang difokuskan pada identifikasi serta mitigasi risiko secara real-time, dengan dukungan komitmen pimpinan dalam menjaga integritas dan kepatuhan pada seluruh lini.

Upaya menjaga dan meningkatkan capaian kinerja juga diperkuat melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK, penyusunan Surat Keputusan Satuan Tugas SPIP BRBIH, penerapan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengendalian, dan pemantauan risiko satuan kerja, serta penyusunan laporan SPIP secara rutin setiap bulan. Selain itu, pengawalan pencapaian indikator dilakukan secara sistematis melalui rapat koordinasi SPIP bulanan sebagai forum evaluasi untuk mengantisipasi potensi kendala administratif maupun operasional, yang didukung oleh pemantauan berkala melalui aplikasi SIDAK guna memastikan seluruh arahan dari Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti secara optimal.

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRBIH merupakan ukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran dari aspek perencanaan, pelaksanaan, serta capaian output kegiatan. Pengukuran dilakukan berdasarkan komponen penilaian yang telah ditetapkan dan bersifat *maximize*, sehingga semakin tinggi nilai IKPA menunjukkan semakin baik kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran.

IKPA tidak hanya mengukur tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menilai ketepatan revisi DIPA, akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD), kualitas belanja kontraktual, ketepatan penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP,

serta capaian output kegiatan. Dengan demikian, nilai IKPA mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan BRBIH dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Periode pengukuran IKPA dilaksanakan secara semesteran, dengan nilai yang digunakan dalam pelaporan kinerja merupakan nilai posisi akhir pada semester berjalan. Semester I mencakup periode Januari sampai dengan Juni, sedangkan Semester II merupakan nilai kumulatif Januari sampai dengan Desember (nilai akhir tahun). Meskipun monitoring dilakukan secara berkala melalui aplikasi myintress, nilai yang digunakan dalam laporan kinerja adalah nilai resmi pada akhir periode semester.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan 3 indikator penilaian yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan rincian variabel sebagai berikut :

Tabel 9. Bobot Nilai IKPA 2026

No	Indikator	Bobot
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RDP (halaman III DIPA)	15
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3	Penyerapan anggran	20
4	Belanja kontraktual	10
5	Penyelesaian tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai IKPA
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
8	Capaian output	25

Sumber: Per-5/PB/2024

Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi My Intress yang dapat diakses pada <https://myintress.kemenkeu.go.id/> dengan kategori nilai IKPA sebagai berikut:

Tabel 10. Kategori Nilai IKPA

No	Nilai IKPA	Kategori
1	≥ 95	Sangat Baik
2	$89 \leq \text{Nilai IKPA} < 95$	Baik
3	$70 \leq \text{Nilai IKPA} < 89$	Cukup
4	< 70	Kurang

Sumber: Per-5/PB/2024

Berdasarkan penjelasan di atas, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tersaji dari tangkapan layar pada aplikasi myintress berikut:

The screenshot displays the 'Indikator Pelaksanaan Anggaran Sarker' report. The table below represents the data shown in the application:

NO	PERIOD	KODE KPA	KODE ES	KODE SATKER	URAIAN SATKER	JERANIAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN			NILAI TOTAL	KINERJA BUDGET	DISPERKASIAN DPM (PENGANGGARAN)	NILAI AKHIR DIPA RENCANA KINERJA (REVISI)
							REVISI DIPA	DEVIASI PELAKSANAAN DIPA	NILAI AKHIR	PENYERAPAN ANGGARAN	REVISI KONTAKTUAL	PERYELAKSANAAN TRIWULAN	PERYELAKSANAAN UP-DATAS	NILAI AKHIR	KINERJA OUTPUT	NILAI AKHIR				
1	Q1 2026	001	002	400000	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN	72,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Myintress 2026

Gambar 6. Indikator Pelaksanaan Anggaran BRBIH Tiwulan I Tahun 2026

Progres indikator kinerja IKPA dengan nilai 72,22 didukung oleh pelaksanaan Layanan Manajemen Keuangan yang berjalan secara optimal. Salah satu aktivitas strategis yang dilakukan adalah penyesuaian Rincian Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala setiap triwulan melalui mekanisme revisi DIPA. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran secara menyeluruh.

Sejalan dengan upaya tersebut, langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai IKPA ke depan antara lain meliputi:

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran per semester dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L.
2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
3. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai.
4. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.
5. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana.
6. Melakukan penginputan capaian output tepat waktu.

Indikator Kinerja 3

Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)

Indikator ini mengukur kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja yang diselenggarakan oleh BRBIH. Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian nilai PM SAKIP BRBIH pada tahun 2026 adalah 81,5 dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH merupakan gambaran tingkat kematangan penerapan manajemen kinerja di lingkungan BRBIH, yang mencerminkan sejauh mana proses perencanaan hingga evaluasi telah dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi hasil.

Pengukuran indikator ini menggunakan nilai posisi akhir tahunan dengan polarisasi *maximize*, sehingga semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan semakin baik kualitas implementasi akuntabilitas kinerja. Hasil penilaian selanjutnya dikategorikan dalam predikat mulai dari Sangat Kurang hingga Sangat Memuaskan, yang menjadi dasar dalam menilai tingkat efektivitas tata kelola kinerja instansi. Sumber data berasal dari hasil penilaian internal satuan kerja yang kemudian diverifikasi oleh Tim SAKIP BPPSDM serta dapat didukung oleh hasil uji petik Inspektorat Jenderal

Program/Kegiatan yang mendukung IKM ini adalah Layanan Pemantauan dan evaluasi berupa pengelolaan dokumen kinerja mencakup Penyusunan dokumen perencanaan kinerja, Verifikasi dan validasi pengukuran kinerja, Penyusunan Laporan kinerja, Evaluasi Rencana Aksi, Penilaian Mandiri SAKIP

Indikator Kinerja 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan secara tahunan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan

Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot dan kategori pada masing-masing indikator sebagaimana berikut:

Tabel 11. Bobot Variabel Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)

No	Variabel	Uraian	Bobot
1	Efektivitas (75)	Capaian RO	75
2	Efisiensi (25)	Penggunaan SBK	10
		Efisiensi SBK	15

Sumber : PMK 62 Tahun 2023

Tabel 12. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Kategori	Nilai KPA
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	> 80-90
3	Cukup	> 60-80
4	Kurang	< 50

Sumber : PMK 62 Tahun 2023

Indikator ini baru akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2026 dengan target yang harus dicapai sebesar 71,75. Sementara itu sejak Triwulan I 2026 rangkaian kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dimulai dari melaporkan capaian RO setiap bulannya hingga perencanaan anggaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026.

Dalam upaya mencapai target, Indikator Kinerja ini didukung oleh program/kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran meliputi kegiatan penyusunan KAK, RAB, RKAKL dan DIPA serta revisi DIPA/RKAKL tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja 5

Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN BRBIH merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pengukuran indeks ini bertujuan untuk menilai kualitas ASN dalam menjalankan perannya secara efektif sesuai dengan tuntutan jabatan yang diemban.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara semesteran dengan menggunakan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi diukur berdasarkan jenjang pendidikan formal terakhir yang dimiliki ASN. Dimensi kompetensi diperoleh dari hasil konversi predikat kinerja tahun sebelumnya serta riwayat pengembangan kompetensi melalui pelatihan baik klasikal maupun non-klasikal selama tahun berjalan. Dimensi kinerja mengacu pada capaian hasil kerja ASN, sedangkan dimensi disiplin mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan kepegawaian.

Sesuai dengan surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 terdapat penyesuaian formula perhitungan untuk IP ASN BKN, berdasarkan surat tersebut penilaian IP ASN KKP pun ikut menyesuaikan. Pada dimensi kompetensi mengalami penyesuaian sebagai berikut:

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN												
		BOBOT DASAR					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
		HASIL PENILAIAN KINERJA												
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>=20 JP	< 20JP
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	proporsional

Sumber : surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Gambar 7. Reformulasi Dimensi Kompetensi Tahun 2026

Sedangkan pada indikator Kualifikasi tahun 2025 mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	25	20	10	10	10
Jabatan Administrator	25	25	20	10	10	5
Jabatan Pegawai	25	25	25	20	10	10
Jabatan Fungsional(keterampilan)	25	25	25	25	20	10
Jabatan Fungsional(keahlian)	25	25	20	10	10	10
Jabatan Pelaksana	25	25	25	25	20	10

Sumber : surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Gambar 8. Reformulasi Dimensi Kualifikasi Tahun 2025

Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja sebagai berikut:

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

Sumber : surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Gambar 9. Kategori Dimensi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDMAO KKP dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Adapun penilaian IP ASN tersebut meliputi 4 (empat) dimensi yaitu Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%) dan Disiplin (5%) dengan pengkategorian sebagai berikut:

Kategori	Nilai
Sangat Tinggi	91 - 100
Tinggi	81 - 90
Sedang	71 - 80
Rendah	61 - 70
Sangat Rendah	0 - 60

Sumber : Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019

Gambar 10. Kategori Nilai IP ASN

Indeks Profesionalitas ASN BRBIH didukung dari berbagai proses pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan terukur berdasarkan beberapa faktor pendukung diantaranya:

- Mendorong seluruh pegawai aktif mengikuti seminar dan diklat sebanyak 20 JP atau lebih untuk meningkatkan dimensi kompetensi.
- Mendorong pegawai yang sedang tugas belajar/izin belajar agar segera menyelesaikan pendidikannya dan selanjutnya diproses pencantuman gelar sehingga nilai pada dimensi kualifikasi dapat meningkat.
- Menghimbau pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan jenjang keahlian agar meningkatkan pendidikan sehingga dapat meningkatkan nilai pada dimensi kualifikasi.
- Tetap melakukan upaya penegakan disiplin melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung dan melalui sosialisasi tentang disiplin pegawai kepada seluruh pegawai BRBIH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang memuat kewajiban dan larangan bagi PNS.

Dalam kaitannya dengan dukungan program/kegiatan Indikator Kinerja ini didukung oleh Layanan Manajemen SDM dengan fokus kegiatan berupa *sharing* info pelatihan dari tim kepegawaian kepada seluruh pegawai, monitoring aplikasi kepegawaian dengan tujuan memantau progress capaian IP ASN masing-masing pegawai serta updating data kepegawaian.

Indikator Kinerja 6

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan BRBIH, khususnya dalam pengelolaan arsip dinamis yang mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Penilaian ini dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip telah sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran indikator ini mengacu pada aspek pengelolaan arsip dinamis dan dukungan sumber daya kearsipan, yang meliputi kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari ANRI yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan dan kematangan pengelolaan arsip di unit kerja.

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan pengukuran pada akhir tahun berdasarkan nilai posisi akhir dengan polarisasi maximize, sehingga semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan semakin baik kualitas pengelolaan arsip. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan sumber data berasal dari Biro Umum, serta didukung oleh dokumen hasil pengawasan dan evaluasi kearsipan internal.

Secara umum, indikator ini mencerminkan komitmen BRBIH dalam mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, sistematis, dan akuntabel sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengelolaan arsip yang optimal juga menjadi elemen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta ketersediaan informasi yang andal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan yang mendukung untuk mencapai target di akhir tahun, indikator kinerja ini didukung oleh Program/Kegiatan Layanan umum meliputi kegiatan berupa perencanaan

program pengelolaan kearsipan, pengawasan kearsipan, identifikasi arsip vital, kontribusi simpul jaringan kearsipan nasional, pengusulan penghapusan aset kondisi rusak berat serta evaluasi sop kearsipan agar memastikan seluruh rangkaian kegiatan kearsipan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja 7

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Dalam pelaksanaannya, capaian indikator dihitung dengan membagi nilai RUP di SiRUP dengan pagu pengadaan, lalu dikalikan 100%. Namun, terdapat ketentuan khusus di mana jika unit kerja mengumumkan RUP melebihi pagu pengadaan (lebih dari 100%), maka selisih kelebihan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator. Data ini dikelola oleh Biro Umum dan PBJ dengan tingkat validitas Output Kendali Rendah dan menggunakan jenis perhitungan Nilai Posisi Akhir.

Pengukuran dilakukan secara triwulanan, di mana penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya dengan bukti dukung berupa Surat atau Nota Dinas dari Biro Umum dan PBJ. Karena memiliki polarisasi *maximize*, semakin tinggi persentase pengumuman yang akurat, maka semakin baik pula kualitas perencanaan PBJ di lingkungan tersebut.

Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Capaian BRBIH berdasarkan Nota Dinas Nomor 1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026 Tanggal 13 April 2026 Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA 2026 dapat dilihat data berikut:

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja 7

SK.01 – Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.07 - Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)									
Realisasi Triwulan I Tahun 2022-2025				Triwulan I Tahun 2026				Target Jangka Menengah	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
			100	77	100	129,87	-	84	119,06

Sumber : Data Primer BRBIH 2026

Capaian IKU 6 pada Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana realisasi Triwulan I mencapai 100% dari target sebesar 77% atau setara dengan 129,87% atau 120% pada aplikasi kinerjajaku. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh rencana umum pengadaan (RUP) telah diumumkan secara tepat waktu. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2025, tidak terjadi peningkatan realisasi capaian di 2026 dengan persentase capaian juga maksimal di 120%. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kinerja pada level optimal, sehingga tidak terdapat kenaikan signifikan karena indikator telah berada pada batas maksimal.

Tingginya capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain komitmen unit kerja dalam memenuhi ketentuan transparansi pengadaan, koordinasi yang baik antara perencana dan pejabat pengadaan, serta pemanfaatan aplikasi SIRUP yang telah berjalan secara

optimal. Selain itu, adanya perencanaan pengadaan yang lebih matang sejak awal tahun turut mendukung percepatan proses pengumuman RUP.

Meskipun capaian telah maksimal, masih terdapat potensi risiko yang perlu diantisipasi, seperti keterlambatan input data akibat perubahan perencanaan anggaran atau revisi kegiatan, serta ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan pengumuman pada sistem. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengendalian internal dan monitoring secara berkala untuk menjaga konsistensi dan kualitas data yang diumumkan.

Sebagai tindak lanjut, strategi yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian optimal melalui peningkatan disiplin penginputan RUP, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta pemantauan berkala terhadap kesesuaian data dalam sistem. Dengan demikian, diharapkan kinerja pada indikator ini tetap terjaga dan terus mendukung prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa.

Kegiatan/Program yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung capaian kinerja yaitu Kegiatan Layanan Umum diawali dengan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi penginputan rencana umum pengadaan BPPSDMKP.

Indikator Kinerja 8

Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)

Indikator Proposal Inovasi Pelayanan Publik BRBIH merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai upaya pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik dimaknai sebagai terobosan atau gagasan kreatif, baik berupa ide baru maupun pengembangan dari inovasi yang telah ada, yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan proposal inovasi mengacu pada ketentuan Kementerian PANRB terkait pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), dimana

setiap unit kerja didorong untuk menghasilkan inovasi yang relevan, aplikatif, dan berkelanjutan. Proposal yang disusun kemudian diajukan kepada tim penilai eselon I untuk dilakukan evaluasi dan penilaian.

Pengukuran indikator ini didasarkan pada jumlah proposal inovasi yang berhasil disusun dan diajukan dalam satu tahun anggaran. Penilaian menggunakan nilai posisi akhir tahunan dengan polarisasi maximize, sehingga semakin banyak proposal inovasi yang diajukan menunjukkan semakin baik kinerja unit dalam mendorong budaya inovasi. Sumber data indikator ini berasal dari berita acara penilaian oleh tim penilai eselon I, dengan bukti dukung berupa dokumen proposal inovasi dan surat penyampaiannya. Pengukuran dilakukan secara langsung (direct) dan dilaporkan setiap tahun sebagai bagian dari evaluasi kinerja organisasi.

Secara umum, indikator ini mencerminkan komitmen BRBIH dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan indikator Proposal Inovasi Pelayanan Publik BRBIH pada Tahun 2026 menunjukkan progres yang baik dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan. Meskipun pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun, langkah awal telah dilaksanakan dengan penyampaian usulan proposal inovasi pelayanan publik melalui Nota Dinas Nomor 45/BRBIH/HP.430/I/2026 tanggal 29 Januari 2026 kepada Sekretaris BPPSDM KP.

Proposal yang diajukan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas sesuai target, tetapi juga menunjukkan kualitas inovasi yang relevan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari inovasi yang diusulkan, antara lain Low Carbon Feed Community (LFC) yang berfokus pada pengelolaan limbah berbasis masyarakat, serta Buku Tamu Digital yang mendukung transformasi layanan berbasis teknologi informasi. Inovasi tersebut

menggambarkan upaya BRBIH dalam menghadirkan solusi yang adaptif, berkelanjutan, dan berdampak.

Progres yang baik ini didukung oleh komitmen pimpinan dalam mendorong budaya inovasi, kesiapan unit kerja dalam menyusun proposal sesuai pedoman Kementerian PANRB, serta respons cepat terhadap permintaan penyampaian usulan inovasi pada awal tahun. Penyampaian proposal sejak Januari menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan kesiapan organisasi dalam mendukung pelaksanaan indikator.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam meningkatkan jumlah dan kualitas inovasi yang dihasilkan, serta memastikan bahwa inovasi yang diajukan memiliki keberlanjutan dan potensi replikasi yang lebih luas. Selain itu, penguatan dokumentasi dan integrasi inovasi dengan program prioritas perlu terus dilakukan agar memberikan dampak yang lebih optimal. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan indikator ini menunjukkan arah yang positif dan diharapkan mampu mendukung pencapaian target pada akhir tahun, sekaligus mencerminkan komitmen BRBIH dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi merupakan program/kegiatan yang berperan penting dalam mendukung pencapaian indikator Proposal Inovasi Pelayanan Publik BRBIH. Melalui kegiatan ini, BRBIH melaksanakan pengusulan proposal inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, mulai dari identifikasi ide inovasi, penyusunan proposal sesuai pedoman yang berlaku, hingga penyampaian usulan kepada unit pembina di tingkat eselon I. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran kehumasan dalam mengomunikasikan inovasi yang dihasilkan serta memastikan bahwa inovasi tersebut memiliki nilai manfaat, keberlanjutan, dan potensi pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, pelaksanaan program ini

tidak hanya mendukung pencapaian indikator kinerja, tetapi juga memperkuat budaya inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BRBIH secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja 9

Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)

Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keinformatifan organisasi dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip yang mendorong pemerintah untuk memberikan akses yang terbuka dan transparan terhadap informasi publik, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan polarisasi maximize, sehingga hasil penilaian baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran.

Dalam pengukurannya, unit kerja harus memenuhi kriteria nilai tertentu, antara lain total nilai pengungkit dan hasil minimal 75, nilai pengungkit minimal 40, serta bobot nilai per area pengungkit minimal 60%. Selain itu, komponen pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus mencapai minimal 18,25 dan komponen pelayanan publik yang prima minimal 14. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh Tim Penilai Internal BPPSDM KP. Indikator ini menggunakan satuan nilai dengan validitas output kendali rendah, dan didukung oleh bukti berupa Surat Keputusan PPID KKP.

Meskipun hasil pengukuran akhir belum dapat disajikan, berbagai upaya telah dilakukan sejak awal tahun sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian indikator ini. Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang terstruktur, BRBIH melalui program Layanan Hubungan Masyarakat

secara konsisten melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengumuman informasi publik. Informasi yang disampaikan meliputi profil unit organisasi, program dan kegiatan, informasi keuangan, serta informasi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan, pengelolaan, dan publikasi informasi melalui media elektronik maupun non-elektronik untuk memastikan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

BRBIH juga telah menyusun dan mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi publik, yang dapat diakses melalui website PPID. Seluruh upaya tersebut menunjukkan komitmen BRBIH dalam mewujudkan transparansi informasi publik secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH pada akhir tahun, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator dalam mengukur efektivitas pengelolaan program kerja. Pada tahun 2026, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) mengelola total alokasi pagu sebesar Rp 8.870.947.000,- yang bersumber sepenuhnya dari Rupiah Murni (RM). Dari alokasi tersebut, realisasi penyerapan anggaran pada triwulan I ini mencapai Rp. 1.949.239.788,- atau 21,97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.870.947.000,-.

Pada Revisi DIPA I BRBIH tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden dengan anggaran sebesar Rp 402.760.000,-. Program dan anggaran ini tercantum pada Halaman IV B DIPA BRBIH berupa Catatan yang pemanfaatannya diatur dengan ketentuan tersendiri sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh BRBIH dalam mendukung capaian kinerja di Triwulan I Tahun 2026. Jika pagu pada Program ini tidak

diperhitungkan, maka persentase realisasi anggaran BRBIH menjadi 23,02% dari pagu Rp. 8.468.187.000,-

1. Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

Secara terperinci, komposisi penggunaan anggaran BRBIH pada tahun 2026 terbagi ke dalam dua kategori utama belanja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2026

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	RO KHUSUS (Rp)	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI (Rp)	% THD PAGU	% THD PAGU EFEKTIF
Belanja Pegawai	5.567.169.000		5.567.169.000	1.373.334.524	24,67	24,67
Belanja Barang	3.303.778.000	402.760.000	2.901.018.000	575.905.264	17,43	19,85
Total	8.870.947.000		8.468.187.000	1.949.239.788	21,97	23,02

Sumber: Aplikasi Myintress Kemenkeu

Berdasarkan tabel realisasi anggaran menurut jenis belanja, total pagu anggaran BRBIH Tahun 2026 sebesar Rp8.870.947.000 dengan pagu efektif setelah RO Khusus sebesar Rp8.468.187.000. Hingga periode pelaporan, realisasi anggaran mencapai Rp1.949.239.788 atau sebesar 21,97% terhadap pagu dan 23,02% terhadap pagu efektif.

Secara rinci, Belanja Pegawai memiliki pagu sebesar Rp5.567.169.000 dengan realisasi sebesar Rp1.373.334.524 atau 24,67% dari pagu, yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja pegawai relatif lebih stabil dan berjalan sesuai dengan kebutuhan rutin. Sementara itu, Belanja Barang memiliki pagu sebesar Rp3.303.778.000 dengan RO Khusus sebesar Rp402.760.000 sehingga pagu efektif menjadi Rp2.901.018.000. Realisasi belanja barang tercatat sebesar Rp575.905.264 atau 17,43% terhadap pagu dan 19,85% terhadap pagu efektif.

Secara umum, tingkat penyerapan anggaran hingga periode ini masih dalam tahap awal pelaksanaan, yang disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung dan sebagian besar akan terealisasi pada triwulan berikutnya. Selain itu, adanya anggaran pada RO khusus pada Belanja Barang turut memengaruhi ruang gerak penyerapan anggaran.

Dengan demikian, realisasi anggaran diperkirakan akan meningkat seiring dengan percepatan pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi penggunaan anggaran pada periode selanjutnya.

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

Total pagu pada DIPA BRBIH adalah sebesar Rp 8.870.947.000,-, namun pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja, adalah sebesar Rp 8.468.187.000,- yang merupakan pagu dari anggaran Program Dukungan Manajemen. Sedangkan pagu sebesar Rp 402.760.000,- pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, tidak dapat dimanfaatkan dalam mendukung target indikator kinerja karena beberapa hal yaitu 1) merupakan program dan anggaran dengan catatan pada halaman IV DIPA BRBIH, 2) kegiatannya tidak sesuai tugas pokok dan fungsi BRBIH, dan 3) memperhatikan kesesuaian antara program, sasaran, indikator yang tercantum pada Renja KKP dan BPPSDMKP Tahun 2026.

Secara umum, realisasi anggaran hingga periode pelaporan masih menunjukkan progres yang bertahap, sejalan dengan karakteristik beberapa indikator yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun, sebagaimana data berikut:

Tabel 15. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA MANDATORY	PAGU (Rp)	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI (Rp)	% THD PAGU	% THD PAGU EFEKTIF
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	8.448.946.000	8.448.946.000	1.948.249.488	23,06	23,06
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	3.559.000	3.559.000	-	-	-
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	3.020.000	3.020.000	204.300	6,76	6,76

NO	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA MANDATORY	PAGU (Rp)	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI (Rp)	% THD PAGU	% THD PAGU EFEKTIF
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	2.268.000	2.268.000	-	-	-
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	3.060.000	3.060.000	-	-	-
		6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	2.502.000	2.502.000	407.000	16,27	16,27
		7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	1.008.000	1.008.000	200.000	19,84	19,84
		8 Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1.512.000	1.512.000	-	-	-
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	2.312.000	2.312.000	179.000	7,74	7,74
Total			8.468.187.000	8.468.187.000	1.949.239.788	23,02	23,02

Realisasi anggaran terbesar terdapat pada indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH dengan nilai sebesar Rp 1.948.249.488,- atau 23,06% dari pagu, yang mencerminkan fokus dukungan terhadap kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan. Sementara itu, beberapa indikator lainnya seperti Penilaian Mandiri SAKIP, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, Persentase pengumuman RUP pada SIRUP, serta Nilai Keterbukaan Informasi Publik telah menunjukkan realisasi awal, meskipun masih relatif rendah karena pelaksanaan kegiatan bersifat bertahap dan menyesuaikan jadwal evaluasi.

Di sisi lain, terdapat indikator yang belum menunjukkan realisasi anggaran pada periode pelaporan, antara lain Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Indeks Profesionalitas ASN, dan Proposal Inovasi Pelayanan Publik. Hal ini disebabkan karena kegiatan pendukung indikator tersebut sebagian besar akan dilaksanakan atau diukur

pada akhir tahun anggaran, sehingga penyerapan anggaran belum terjadi pada tahap awal.

Dengan demikian, kondisi realisasi anggaran saat ini belum sepenuhnya mencerminkan capaian akhir kinerja, melainkan menunjukkan progres pelaksanaan kegiatan yang masih berjalan. Keberhasilan realisasi anggaran pada akhir tahun sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan kegiatan pada semester berikutnya, termasuk konsistensi dalam pelaksanaan rencana kerja serta pengendalian anggaran.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, BRBIH juga melakukan penyesuaian strategi pendanaan sepanjang tahun berjalan. Penyesuaian ini dilakukan melalui revisi administratif pada dokumen anggaran guna merespons dinamika kebutuhan organisasi serta kebijakan strategis di tingkat kementerian. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tetap tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan prioritas kinerja yang telah ditetapkan.

2. Perubahan Anggaran (Revisi DIPA)

Dalam rangka menjaga fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, selama triwulan I tahun 2026 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali revisi DIPA. Perubahan ini dilakukan untuk merespons kebijakan strategis kementerian. Rincian mengenai perubahan dan perkembangan pagu anggaran tersebut dirangkum dalam poin berikut:

Tabel 16. Rincian Revisi DIPA BRBIH Tahun 2026

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
Awal	Tanggal	1 Desember 2026	-
	Belanja Pegawai	5.571.957.000	-
	Belanja barang	3.298.990.000	-
	Total	8.870.947.000	
1	Tanggal	1 Desember 2025	31 Desember 2025
	Belanja Pegawai	5.571.957.000	5.567.169.000
	Belanja barang	3.298.990.000	3.303.778.000
	Total Anggaran	8.870.947.000	8.870.947.000
	Program	1 Program	2 Program

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
	Keterangan	Revisi Anggaran RO Khusus berdasarkan: Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1158/AG/AG.3/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran ROK Khusus Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan TA 2026	
2	Tanggal	31 Desember 2025	12 Februari 2026
	Belanja Pegawai	5.567.169.000	5.567.169.000
	Belanja barang	3.303.778.000	3.303.778.000
	Total Anggaran	8.870.947.000	8.870.947.000
	Program	1 Program	2 Program
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA	

Dalam rangka menjaga fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali revisi DIPA. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan strategis di tingkat kementerian serta kebutuhan penyesuaian pelaksanaan anggaran di awal tahun. Rincian perubahan pagu anggaran tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 16.

Secara umum, revisi yang dilakukan tidak mengubah total pagu anggaran sebesar Rp8.870.947.000, namun lebih kepada penyesuaian komposisi belanja dan administrasi perencanaan kas. Pada revisi pertama, terjadi pergeseran alokasi dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang, serta perubahan struktur program dari semula 1 program menjadi 2 program sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran dalam rangka mendukung program prioritas presiden. Selanjutnya pada revisi kedua, tidak terdapat perubahan pada pagu maupun komposisi belanja, melainkan hanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA guna meningkatkan ketepatan perencanaan kas.

Sementara itu, hingga periode Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran masih menunjukkan progres yang bertahap dan belum mencerminkan capaian akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar akan terealisasi pada triwulan berikutnya, serta

adanya indikator kinerja yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran pada tahap ini masih relatif rendah dan akan meningkat seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang semakin intensif.

Meskipun demikian, BRBIH tetap melakukan upaya optimasi pengelolaan anggaran melalui penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh Rencana Penarikan Dana (RPD) berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Halaman III DIPA, meminimalkan penumpukan realisasi di akhir tahun, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.



Bab 4

Penutup

IV. PENUTUP

A. Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan progres yang baik dalam mendukung pencapaian target tahunan. Hal ini tercermin dari hasil pemantauan melalui aplikasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyajikan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai indikator komposit atas pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian kinerja tersebut ditampilkan dalam Dashboard Kinerja BRBIH sebagai berikut.



Sumber : Aplikasi Kinerjaku 2026

Gambar 11. Dashboard Kinerjaku BRBIH level 3 BRBIH

Berdasarkan Dashboard Kinerja BRBIH Triwulan I Tahun 2026 pada gambar di atas, nilai NKO menunjukkan posisi yang berada pada kategori baik dengan nilai NKO sebesar 110%, yang ditunjukkan melalui indikator pada masing-masing komponen kinerja. Tampilan dashboards memberikan gambaran tingkat capaian terhadap target yang telah ditetapkan, di mana sebagian indikator telah menunjukkan progres awal yang positif.

Namun demikian, capaian tersebut masih bersifat sementara karena sebagian besar indikator kinerja memiliki periode pengukuran tahunan,

sehingga nilai pada triwulan I lebih mencerminkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dibandingkan hasil akhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian dan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya agar seluruh indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dashboard kinerja ini tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis guna memastikan ketercapaian kinerja organisasi secara optimal pada akhir tahun anggaran, dengan rincian capaian indikator sebagai berikut.

Tabel 17. Capaian Kinerja BRBIH Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN I 2026	CAPAIAN TRIWULAN I 2026	%
Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2026						110
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86	86	86	100
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1			
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5			
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,75			
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82,1			
		6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71			
		7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77	77	100	120
		8 Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1			
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90			

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Berdasarkan data diatas, capaian pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh keberhasilan pemenuhan 2 (dua) indikator kinerja yang ditargetkan pencapaiannya di triwulan I Tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja triwulan I tahun 2026, menunjukkan bahwa 1 IK berstatus biru dan 1 IK berstatus hijau yang artinya persentase capaian kedua IK tersebut diatas 100% dari target pada PK. Indikator terkait tata kelola dan akuntabilitas menunjukkan performa yang kuat, yaitu pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan yang mencapai 100%, dan persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP mencapai 120,00%, yang menunjukkan kualitas perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan SDM yang semakin baik dan tertib regulasi.

Dengan capaian seluruh indikator yang ditargetkan pada triwulan I berada pada kategori baik hingga sangat baik, maka dapat disimpulkan kinerja BRBIH Tahun 2026 berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Capaian ini menjadi fondasi yang kuat bagi BRBIH untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya, sekaligus memperkuat kontribusi dalam mendukung tujuan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Permasalahan dan Rekomendasi

BRBIH telah melakukan upaya pencapaian target kinerja Triwulan I di Tahun 2026. Hal ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target masing-masing IKU yang ditetapkan. Seluruh IKU telah mencapai target yang ditetapkan. Nilai ini tentunya perlu dipertahankan dengan melakukan pengawalan guna memastikan nilai ini dapat tetap optimal di triwulan berikutnya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja adalah belum optimalnya proses penginputan capaian output sebagai salah satu indikator penilaian IKPA untuk periode Januari hingga Maret Tahun 2026. Hal ini disebabkan karena hingga akhir Triwulan I Tahun

2026, petunjuk teknis (juknis) terkait pengisian proyeksi dan realisasi capaian output Tahun 2026 dari Kementerian Keuangan belum diterbitkan, sehingga belum dapat dilakukan penginputan data secara penuh. Kondisi ini berdampak pada belum tersajinya data capaian output pada progress nilai IKPA triwulan I Tahun 2026.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, setelah petunjuk teknis (juknis) pengisian proyeksi dan realisasi capaian output Tahun 2026 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, maka di rekomendasikan untuk segera dilakukan percepatan penginputan data capaian output untuk periode Januari hingga Maret 2026 pada Aplikasi Sakti oleh Operator Komitmen. Upaya ini juga perlu didukung dengan pemantauan secara berkala guna mengantisipasi keterlambatan pada periode berikutnya, sehingga penyajian data kinerja dapat lebih akurat, tepat waktu, dan mendukung pengambilan keputusan secara efektif.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRBIH. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRBIH. Akhirnya, BRBIH berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



Lampiran

LAPORAN
KINERJA
—
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
2026

KKP
2026
BANGUN STRONGER

BRBIH
Balai Riset Budidaya Ikan Hias



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

JALAN PERIKANAN NOMOR 13 PANCORAN MAS DEPOK 16436
TELEPON (021) 7520482, 77206803, 77216973
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL brbih.depok@kkp.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
NOMOR 17/BRBIH/RC.610/I/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan uraian tugas serta penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias TA. 2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas dan telah memenuhi syarat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diperlukan rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias mengenai Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

- 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
 6. Surat Pengesahan DIPA Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor: SP DIPA-032.12.2.403830/2026 Tanggal 1 Desember 2025;
 7. Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias dengan Sekretaris BPPSDM KP TA. 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab :
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2026;
 - b. Ketua Tim Penyusun:
Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) BRBIH TA. 2026, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab Tim Penyusun LKJ;

- c. Anggota Tim Penyusun:
Membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja BRBIH TA. 2026;
- d. Sekretariat :
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2026 lingkup BRBIH.
- e. Kontributor:
Menyampaikan data dan informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan kinerja (LKj)

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

tanggal 15 Januari 2026

Kepala PEGUNA ANGGARAN



HARYADI D

Tembusan:

- 1. Sekretaris BPPSDM KP;
- 2. Pegawai yang bersangkutan.

- 4 -

Lampiran SK

Nomor : 17/BRBIH/RC.610/1/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Penanggung Jawab	Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias
2	Ketua Tim Penyusun	Sub Bagian Umum
3	Anggota Tim Penyusun	1. Subkoordinator Kelopak Tata Operasional 2. Subkoordinator Kelompok Tata Usaha 3. Subkoordinator Kelompok Pelayanan Teknis
4	Sekretariat	1. Shella Savitri 2. Iswahyudi 3. Susiyanti 4. Galuh Laksita Swasti 5. Ipan Dahniar
5	Kontributor	1. Ifana Agustina 2. Fitri Rahmawati 3. Dewinta Hesti Widyastantri

Ditetapkan di Depok

Tanggal 15 Januari 2026

PENGGUNA ANGGARAN



ICENYARYADI D

Tembusan:

1. Sekretaris BPPSDM KP;
2. Pegawai yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joni Haryadi D**
Jabatan : **Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias**
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : **Joni Haryadi D**
Jabatan : **Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82,1
		6.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71
		7.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77
		8.	Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1
		9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.870.947.000
Total Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun 2026		8.870.947.000

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D



BRBIH

Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Jl. Perikanan Raya No.13, Pancoran
MAS, Kec. Pancoran Mas, Kota
Depok, Jawa Barat 16436